

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis kebebasan pers dalam peliputan Pemilu 2024 dengan mengambil Kompas.com sebagai studi kasus utama. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana kebebasan pers dalam pemilu 2024 di Kompas.com. Melalui metode kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan jurnalis Kompas.com serta pengumpulan data sekunder dari literatur dan laporan independen, ditemukan bahwa intervensi terhadap kerja jurnalistik memang terjadi, meskipun tidak selalu dalam bentuk tekanan langsung atau eksplisit dari institusi negara. Justru intervensi tersebut lebih sering terjadi dalam bentuk tekanan halus atau terselubung dari tim kampanye pasangan calon presiden tertentu, yang berusaha mempengaruhi isi dan arah pemberitaan.

Bentuk intervensi yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi pendekatan personal kepada jurnalis, permintaan untuk mengubah sudut pandang pemberitaan agar lebih menguntungkan pihak tertentu, pembatasan akses terhadap narasumber politik, hingga penghindaran terhadap isu-isu yang dinilai sensitif atau dapat merugikan citra kandidat tertentu. Selain itu, terdapat juga kecenderungan dari narasumber politik dan institusi pemilu seperti KPU maupun Bawaslu untuk lebih selektif dalam memberikan informasi, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan dalam distribusi informasi bagi jurnalis. Tekanan-tekanan tersebut tidak serta-merta membungkam pers secara langsung, namun cukup untuk menciptakan atmosfer kerja yang membuat jurnalis harus berhati-hati dalam menentukan narasi dan sudut pandang berita yang mereka sajikan kepada publik.

Akibat dari situasi ini, praktik *self-censorship* atau penyensoran diri menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh jurnalis untuk menghindari konflik dengan pihak-pihak berkepentingan. Praktik ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks politik dan kepentingan pemilik media, narasumber, serta tekanan sosial yang ada di sekeliling mereka. Meskipun praktik *self-censorship* dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap kebebasan pers, dalam konteks ini hal tersebut menjadi

bentuk perlindungan atas keselamatan jurnalis maupun keberlanjutan media itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam tahun politik seperti Pemilu 2024, ruang kebebasan pers menjadi semakin sempit dan menantang.

Namun demikian, dalam menghadapi intervensi dan tekanan tersebut, Kompas.com sebagai media arus utama tetap menunjukkan upaya serius dalam menjaga independensi editorialnya. Tim redaksi menerapkan prinsip keberimbangan (*balance*), akurasi, dan verifikasi dalam proses peliputan, serta berusaha memisahkan dengan tegas antara opini dan fakta agar berita yang dihasilkan tetap objektif dan tidak tendensius. Sikap ini mencerminkan komitmen jurnalisme profesional yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab publik. Dalam konteks ini, Kompas.com berhasil memosisikan dirinya sebagai media yang berusaha netral dan tidak memihak, meskipun di tengah tekanan dan dinamika politik yang kompleks.

Temuan dari penelitian ini juga memperlihatkan bahwa aktor politik, khususnya tim sukses pasangan calon presiden, akan selalu berupaya untuk membangun pengaruh terhadap media sebagai bagian dari strategi kampanye mereka. Hal ini sebenarnya bukan fenomena baru, karena dalam banyak studi media dan politik, hubungan antara politisi dan media memang bersifat saling memengaruhi. Namun demikian, intervensi yang berlebihan, terutama yang bertujuan untuk mengontrol isi pemberitaan, dapat mengancam prinsip dasar kebebasan pers yang menjadi fondasi penting dalam sistem demokrasi. Kebebasan pers yang sehat seharusnya memungkinkan jurnalis untuk bekerja tanpa tekanan, intimidasi, maupun sensor, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Dalam kerangka demokrasi, media memegang peran penting sebagai pilar keempat yang berfungsi mengawasi jalannya kekuasaan serta memastikan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan dapat diakses oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan kebebasan pers harus menjadi perhatian bersama, baik oleh negara, masyarakat sipil, maupun industri media itu sendiri. Dalam konteks Pemilu 2024, ketika informasi menjadi komoditas politik yang sangat strategis, independensi media menjadi ujian penting bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengindikasikan bahwa tantangan terhadap

kebebasan pers tidak hanya datang dari tekanan langsung, tetapi juga dari tekanan struktural, hubungan kekuasaan, serta dinamika kepemilikan media.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers dalam Pemilu 2024 belum sepenuhnya terjamin. Intervensi terhadap jurnalis Kompas.com memang terjadi dalam bentuk-bentuk yang halus, namun cukup signifikan untuk memengaruhi cara kerja jurnalis dan hasil pemberitaan yang mereka sajikan. Kompas.com menunjukkan upaya yang kuat untuk mempertahankan integritasnya, namun fenomena ini tetap menjadi refleksi bahwa kebebasan pers masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam tahun politik. Untuk itu, perlu adanya penguatan perlindungan hukum terhadap jurnalis, peningkatan transparansi dari lembaga negara, serta pembentukan budaya politik yang menghormati independensi media sebagai fondasi utama demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pers, politik, serta pengembangan demokrasi di Indonesia:

1. Bagi Pemerintah dan penyelenggara pemilu

Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, seharusnya menjaga jarak yang sehat dari aktivitas pemberitaan media. Mereka perlu menjamin akses informasi yang setara bagi seluruh jurnalis tanpa memandang afiliasi media, serta tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat manipulatif atau menekan terhadap ruang redaksi. Transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi kepada media menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga integritas pemilu.

2. Bagi Praktisi Media dan Jurnalis

Jurnalis dan redaksi media perlu terus meningkatkan profesionalisme serta memperkuat ketahanan terhadap tekanan politik, terutama dalam tahun-tahun politik. Upaya menjaga

independensi, verifikasi fakta, dan keberimbangan dalam peliputan harus tetap menjadi prioritas. Selain itu, penting pula bagi redaksi untuk memiliki kebijakan editorial yang jelas dalam menghadapi tekanan dari aktor-aktor politik, termasuk menyiapkan pelatihan internal agar jurnalis memiliki pemahaman etis yang kuat.

3. Bagi Manajemen Media (Pemilik dan Pimpinan Redaksi)

Pemilik dan pimpinan media diharapkan tidak mencampuri isi redaksi demi kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Independensi redaksi harus dilindungi sebagai prinsip utama dalam menjaga kredibilitas media. Oleh karena itu, pemisahan antara kepentingan bisnis dan ruang redaksi mutlak diperlukan agar kerja jurnalistik tidak kehilangan integritasnya.

4. Bagi Organisasi Profesi dan Lembaga Pengawas Media

Dewan Pers dan organisasi profesi seperti AJI diharapkan lebih aktif dalam mengadvokasi kebebasan pers, terutama saat momen-momen politik seperti pemilu. Upaya perlindungan terhadap jurnalis harus diperkuat, baik dalam bentuk pendampingan hukum, kampanye kesadaran publik, maupun edukasi kepada politisi tentang pentingnya menghormati kebebasan pers.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam lingkup media dan waktu yang terbatas pada satu momentum politik. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam dinamika relasi antara media dan kekuasaan pada berbagai jenis media, termasuk media alternatif dan lokal, serta dalam konteks waktu yang lebih panjang untuk menangkap perubahan tren kebebasan pers secara komprehensif.